

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggono, Bayu Dwi. *Reformasi Regulasi di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju, 2004.
- Kelsen, Hans, dan A Javier Trevino. *General theory of law & state*. Routledge, 2017.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno, S H. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Pertimbangan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marbun, S.F. dan Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Susanti, Bivitri. *Hukum Administrasi dan Good Governance di Indonesia*. Jakarta: PSHK, 2020.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1960.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

ARTIKEL JURNAL

- Agustina, Ludya. "Studi Komparatif Penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah." Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Astriani, Suci. "Pengaturan Praperadilan Terhadap Tersangka yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)." Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022.
- Fitri Novia. "Begini Prosedur Penetapan DPO yang Benar di Mata Hukum." *hukumonline.com*, 2022.
- Mansar, Adi. "Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal." *Jurnal UMSU*, 2022.
- Sanusi, Albert. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian." *Fiat Justisia* 10 no. 2, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5216).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 178).
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1220).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273).
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 239).

- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1742/F/Fd. 1/08/2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian Perkara yang Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Nota Dinas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5-UM.01.01-295 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pengajuan Pengusulan Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK) Bagi Orang Asing Yang Diduga Melanggar dan Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-0833 Tahun 2019 Perihal Pedoman Pengajuan Usulan Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK).

INTERNET

- Imigrasi, Admin. "Imigrasi Berhasil Tangkap WNA yang Sempat Buron Setelah Pukul Marbot Masjid." [imigrasi.go.id](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/01/17/imigrasi-berhasil-tangkap-wna-yang-sempat-buron-setelah-pukul-marbot-masjid), 2025.
https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/01/17/imigrasi-berhasil-tangkap-wna-yang-sempat-buron-setelah-pukul-marbot-masjid.
- Penulis, Tim. "Status Daftar Pencarian Orang (DPO): Apakah Memiliki Masa Berlaku?" [hukumku.id](https://www.hukumku.id/post/masa-berlaku-status-dpo), 2025. <https://www.hukumku.id/post/masa-berlaku-status-dpo>.
- Zulfikar, Muhammad. "Kemenkumham: Aplikasi Cekal Online dapat digunakan beberapa instansi." [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/2786677/%40Antara_Jabar), 2022.
https://www.antaranews.com/berita/2786677/%40Antara_Jabar.